



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN
PENGUNAAN INTERNET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
GAYO LUES**

Maulana Surya Zikri

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

Email : maulanasuryazikri@gmail.com

Abstract

This research was conducted at the Gayo Lues Regency Communication and Informatics Service (Diskominfo). The aim of this research is to find out how to implement the policy for managing the acceleration of internet use in the Gayo Lues government environment. The type of research carried out in this research is using a descriptive method with qualitative data processing, namely a method that describes situations and events in the field through observation and interviews. The results of this research show that the policy for managing the acceleration of internet use within the Gayo Lues government has been implemented and in practice there are still several obstacles which are a big obstacle for the Department of Communication and Informatics (Diskominfo), especially the inadequate budget and Human Resources (HR).

Keywords: Policy Implementation, information Technology, Base Transceiver Station(BTS)

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten Gayo Lues. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Pengelolaan Percepatan Penggunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan Gayo Lues. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif, yaitu metode yang menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada dilapangan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues telah diimplementasikan dan dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala besar bagi Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) terutama pada jumlah anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Teknologi Informasi, Base Transceiver Station(BTS)

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memperlancar segala aktivitasnya. Saat ini, komunikasi jarak jauh merupakan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi telekomunikasi sudah menjadi sarana yang tak terpisahkan dari pola kehidupan manusia. Hal ini mendorong teknologi telekomunikasi untuk terus berkembang untuk terus memberikan kemudahan bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dimana pun mereka berada. Skenario global tentang pembangunan teknologi komunikasi dan informasi juga merumuskan perkembangan ekonomi dan perubahan sosial di negara-negara dunia semakin bertambah dengan kemajuan komputer dan teknologi ICT pada abad 21 ini (Selwyn 2004). Bahkan beberapa ahli mengemukakan argumen bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan dampak terhadap perubahan yang disebut oleh Castell sebagai ‘knowledge economy’ dan ‘network societies’ (Castell 1996, 1997, 1998, Reich 1991) Kemampuan penggunaan teknologi komunikasi dan informatika dianggap penting bagi era “modernisasi”. Konsepsi “modernisasi” sendiri diukur dengan kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pembangunan teknologi komunikasi dalam proses industrialisasi diarahkan untuk kemajuan warga negaranya. Pemerintah berkeinginan membawa warga negaranya agar tidak tertinggal atau “left behind” dan bisa memenangkan atau “winning” era globalisasi yang terjadi (Selwyn 2004).

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat memang dianggap akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama peningkatan kualitas kehidupan. Kedatangan TIK dapat dianggap sebagai “*individual empowering*” atau pemberdayaan bagi individual (D’Allesandro & Dosa 2001). Pembangunan TIK juga meningkatkan level interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat sipil (Katz, dkk. 2001). Keinginan mewujudkan masyarakat modern yang tidak tertinggal dengan kondisi globalisasi, mendorong pemerintah untuk berupaya memajukan kualitas kehidupan warga negaranya melalui program-program pembangunan teknologi informasi hingga ke pelosok desa. Tujuannya adalah selain memberikan akses murah terhadap TIK juga mengenalkan penggunaan TIK untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Agar tidak dikatakan sebagai masyarakat yang buta akan informasi. Internet (*interconnectionnetworking*) menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.

Melalui sarana internet diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dalam pencarian segala informasi yang dibutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aplikasi-aplikasi internet yang dapat bermanfaat di segala bidang pembangunan. Sarana jaringan telekomunikasi dan informasi di daerah adalah bangunan tower mini yaitu Base Transceiver Station (BTS). *Base Transceiver Station* atau (BTS) adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah dan sejenis gawai lainnya, kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Jadi BTS merupakan sebuah rangkaian yang memiliki peran untuk membantu masyarakat dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya yang terpisah oleh jarak dan waktu. Instalasi BTS biasanya dilakukan pada sebuah *tower*, menara dan bangunan tinggi lainnya, agar sinyal yang dipancarkan dapat menjangkau area yang luas. Base Transceiver Station (BTS) merupakan bagian dari Base Station Subsystem untuk sistem manajemen. *Base Transceiver Station* (BTS) dibangun berdasarkan usul pemerintah daerah melalui kerjasama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Pemerintah Daerah, perusahaan penyediaan transmisi, power dan tower serta operator selular.

Daerah Kabupaten Gayo Lues selain memiliki 77 wilayah *blankspot*, Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah strategis dengan berbagai potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Adapun beberapa potensi yang di miliki Kabupaten Gayo Lues adalah bidang pertanian, industri, perkebunan dan pariwisata. Namun, potensi pada bidang-bidang tersebut belum dikembangkan dengan baik. Padahal melalui pengembangan bidang-bidang tersebut dapat membangun perekonomian. Oleh karena itu, dengan adanya penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika di harapkan mampu untuk menghidupkan potensi pada bidang-bidang tersebut dengan maksimal. Selain itu melalui pembukaan akses informasi masyarakat perbatasan, pemanfaatan penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Akses Informasi Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues adalah melalui Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS). Adapun pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dilakukan pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil). Selain itu, berdasarkan Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa dalam pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) terfokus pada wilayah yang belum memiliki sinyal atau *blankspot area* serta belum memiliki sarana telekomunikasi dan informasi

diwilayahnya.

Base Transceiver Station (BTS) memberikan dampak positif terhadap perkembangan informasi dan komunikasi masyarakat. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) memberikan kemudahan berkomunikasi dan memperoleh komunikasi. *Base Transceiver Station* (BTS) juga mempermudah dalam berkomunikasi, membantu segala urusan menjadi lebih cepat jika dibanding tidak adanya *Base Transceiver Station* (BTS) yang akan sulit untuk berkomunikasi. Ketersediaan jaringan internet, telekomunikasi dan informasi pada suatu wilayah merupakan hal penting terutama dalam hal pembangunan dan juga akses suatu pemerintahan maupun perkantoran. Pembukaan akses internet memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat berkembang dan terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomena yang terjadi di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode Deskriptif Kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada di lapangan. Menurut (Arikunto, 2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian dengan jenis ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian menggunakan individu sebagai pemberi informasi. Sumber data didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gayo Lues seperti Kepala Dinas Kominfo dan beberapa pegawainya serta masyarakat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akselerasi transformasi digital di Indonesia yang meliputi percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, dan penyiapan peta jalan (*roadmap*) transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi Pusat Data Nasional serta penyiapan regulasi, skema-skema pendanaan transformasi digital, dan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia sebagai talenta digital adalah arahan Presiden Joko Widodo terkait akselerasi transformasi digital di Indonesia. Namun adakalanya terjadi '*digital divide*', yaitu keberadaan teknologi komputer, jaringan internet, dan pelayanan telepon yang baik, cepat dan murah

tidak bisa diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Mereka yang berada di perkotaan saja yang memiliki kondisi infrastruktur internet dan layanan telepon yang lebih baik sedangkan masyarakat di daerah pedesaan belum bisa mendapatkan komputer yang bagus, jaringan internet cepat dan layanan telepon yang baik.

Hal ini juga terjadi di Gayo Lues. Dengan segala dukungan yang ada, hingga saat ini Daerah Kabupaten Gayo Lues masih memiliki 77 wilayah *blankspot*. Bupati Gayo Lues melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Gayo Lues menyatakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jaringan serta interkoneksi bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues (SKPK) yang menghasilkan kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintah Gayo Lues untuk diimplementasikan.

Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Namun, percampuran berbagai sistem nilai dalam perumusan kebijakan tidak bisa dihindari karena perumus kebijakan sebagai manusia tidak mungkin bisa menghindar dari kepentingan pribadi, kelompok, ideologi, dan sebagainya. Di samping itu, dalam proses kebijakan persinggungan berbagai nilai adalah hal yang wajar. Bahkan sekalipun disadari bahwa perumus kebijakan yang semula berangkat dari dan didominasi oleh sistem nilai tertentu katakanlah misalnya nilai partai politik mereka tetap berusaha dan berjuang agar nilai tersebut bisa diterima oleh pihak lain sebagai nilai bersama (*shared values*) atau nilai yang diperjuangkannya tidak berseberangan dengan nilai kebijakan yang diinginkan dan diterima oleh semua (Islamy, 2016).

Berdasarkan temuan di lapangan, Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues berhasil diimplementasikan. Baik pemerintah dan masyarakat telah merasakan manfaat dari implementasi ini. Selain itu, pelayanan yang efektif dan efisien adalah salah satu perwujudan dari terlaksananya fungsi pemerintah daerah hal ini juga sejalan dengan Tanjung dan Hajar (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimal mewujudkan tugas dan fungsi pemerintahan.

Meskipun demikian, dalam implementasi kebijakan, perlu memperhatikan sistem pengimplementasian dari awal implementasi kebijakan hingga implementasi kebijakan ini berakhir. Hal ini juga sejalan dengan Usman (2020) bahwa kinerja dalam sistem pelaksanaan dapat dilihat dengan bagaimana pekerjaan dilakukan dan bagaimana penampilan pada saat

pekerjaan dilakukan sampai pekerjaan selesai dikerjakan menyatakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Dari segi perpeskitif proses, implementasi kebijakan ini telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang telah disepakati dan hal ini juga sejalan Wahab (2001) yang menyatakan dengan kebijakan Publik, paling tidak dalam bentuk positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secar akeseluruhan (community as as whole) dan memiliki daya pakasa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Dari perspektif hasil, implementasi kebijakan ini telah membawa perubahan dimana baik masyarakat dan pemerintah kini lebih efektif dan efisien dalam berkegiatan yang membutuhkan internet hal ini sejalan dengan Akib (2010) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Hal ini juga sejalan dengan Jumroh (2021) yang menyatakan organisasi modern seperti pemerintahan daerah, bisa dinyatakan bahwa hampir semua kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik adalah sudah dilaksanakan, dalam arti sudah didukung oleh aturan mainnya, tersedia anggarannya, serta ada sumber daya dan peralatan yang mendukungnya, sehingga tinggal dilaksanakan saja. Adalah soal lain ketika sudah dilaksanakan tetapi kinerjanya dianggap masih rendah. Misalnya serapan anggarannya yang rendah, tidak tepat waktu, mutu atau kualitas produknya yang rendah dan sebagainya. Jika demikian kondisinya, maka kinerja pelayanan tersebut dinyatakan rendah atau tidak berkualitas. Sebaliknya jika sudah dilaksanakan sebagaimana SOP dan dianggap efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya dan tepat waktu, maka pelaksanaan program dan kegiatan publik tersebut sering dianggap berhasil.

Namun, Diskominfo saat ini sedang menghadapi tantangan kurangnya anggaran serta

SDM. Menurut Edward III (1984) salah satu syarat utama keberhasilan proses implementasi adalah sumber daya yang meliputi staf yang cukup jumlah dan mutunya hal ini juga sejalan dengan Mukhsin (2020) yang menyatakan bahwa jika teknologi tercanggih sekalipun tapi tidak ada yang mengoperasikannya, maka sistem tidak akan berjalan dengan maksimal. Perpaduan teknologi dan manusia pengelola merupakan kunci suksesnya penerapan. Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting karena sumber daya yang lainnya dapat diadakan sesuai dengan kemampuan dimilikinya. Namun, sumber daya manusia pengadaannya melalui proses yang kompleks ketimbang yang lainnya. Dalam manajemen sumber daya manusia, pengadaannya melalui domain kebijakan sumber daya manusia (Bernardin & Russel, 1993: 12), meliputi:

1. *Organizational design;*
2. *Staffing;*
3. *Reward systems, benefits, and compliance;*
4. *Performance management;*
5. *Employee and organizational development; and*
6. *Communication and public relation.*

Hal ini menunjukkan kompleksnya aktivitas manajemen sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi, agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Peranan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama yang penting dalam suatu organisasi ataupun program yang dilaksanakan termasuk dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini juga sesuai dengan Nasution (2021) yang menyatakan bahwa peranan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang penting dalam organisasi.

Nirwandar dalam Waluyo mengemukakan bahwa dalam pembentukan organisasi Daerah perlu mengukur kemampuan pembiayaan dana kemanfaatannya bagi pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Kurangnya anggaran juga masih menjadi hambatan bagi Diskominfo Gayo Lues dan hal ini jelas bertentangan dengan Grindle (1980) yang menyatakan Proses implementasi baru akan dimulai apabila dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Hal ini dapat terjadi karena banyak hal. Diantaranya adalah karena anggaran yang diterima memang kecil atau ada perubahan saat perencanaan. Pada saat perencanaan, besaran anggaran masih sangat indikatif maka sering disebut sebagai pagu indikatif. Pada posisi pagu

indikatif itulah jumlah yang akan disasar sangatlah terbatas dan selektif karena proses teknokratis menuntut seperti itu. Namun pada proses berikutnya yaitu penganggaran (KUA PPAS dan APBD) selalu terjadi perubahan kemampuan keuangan daerah (kepastian DAU, DAK dan Dana Perimbangan lainnya), sehingga menimbulkan perubahan pagu indikatif menjadi plafon anggaran dan selanjutnya menjadi definitif anggaran (DPA). Perubahan rupiah tentunya memicu perubahan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Santoso, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues adalah sebagai berikut:

1. kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues telah diimplementasikan.
2. Dari segi perpeskitif proses, implementasi kebijakan ini telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang telah disepakati.
3. Dari pesrpektif hasil, implementasi kebijakan ini telah membawa perubahan dimana baik masyarakat dan pemerintah kini lebih efektif dan efisien dalam berkegiatan yang membutuhkan internet
4. Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues masih memghadapi hambatan yang berasal dari kurangnya anggaran dan SDM.
5. Masyarakat serta pemerintah Gayo Lues telah merasakan hasil dari Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues meskipun implementasi belum rampung.
6. Efektifitas dan efisiensi yang diharapkan dari Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues meningkat semenjak kebijakan ini implentasikan.
7. Pada era modern ini, masih ada daerah-daerah yang belum memiliki internet yang berkualitas bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa , dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, Volume 1 No. 1
- Arikunto, S. 2018. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

- Bernardin, H. John. Russel, Joice E. A. 1993. *Human Resource Management: An Experiential Approach*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- D'Allesandro D & Dosa N (2001) Empowering children and families with information technology. *Archive of Peadriatric & Adolescent Medicine* 155(10): 1131-6.
- hajar, S. (2015). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Model Total Quality Service (TQS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Hampan Perak.
- Irwan Syari Tanjung, S. H. (2015). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Model Total Quality Service (TQS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Hampan Perak.
- Islamy, M. I. (2016). *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Jumroh. 2021. Kelebihan dan Kekurangan Digital Marketing. <https://blog.mtarget.co/quantity-kelebihan-dan-kekurangan-digitalmarketing/> (diakses pada 29 Mei 2023)
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Katz JR Rice & Aspden P (2001) The Internet 1995-2000: Access, civic involvement and social Interaction. *American Behavioural Scientist* 45(3): 405-19
- Mukhsin. (2020). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi.
- Nasution, N. (2021). Digital transformation to the sustainability of public relations profession in the era of disruption. *Commicast*, 52-57.
- Reich R (1991) *The work of nations: a blueprint for the future*. London: Simon & Schuster.
- Selwyn, N. (2004). Reconsidering Political and Popular Understanding of the Digital Divide: in *New Media & Society*. Sage Publication, 6(3), 341–362.
- Usman, Suwandi (2020). Pengaruh Penempatan, Kompensasi Dan Pelatihan Kerjaterhadap Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan Negara: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.